# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel yang akan diteliti dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu. Selanjutnya, pada bab ini penulis juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran teoritis yang pembahasannya tentang model dan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen, kemudian diiringi dengan hipotesis yang diajukan.

### 2.1.1 Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan sebuah teori yang berfokus pada kualitas hidup manusianya itu sendiri. Pembangunan manusia mempunyai arti yang luas, namun ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai potensi kekayaan bangsa, sehingga pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990). Konsep ini berbeda jika dibandingkan dengan konsep konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama kepada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan manusia. Konsep pertumbuhan ekonomi lebih

menekankan pada peningkatan produk nasional dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP *(Human Development Report,* 1995:103) dalam (Siswati & Hermawati, 2018), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memerhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu: produktivitas, pemerataan, keseimbangan dan pemberdayaan.
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dalam menganalisi pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pembangunan pada awalnya diarahkan dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai bentuk tingkat kesejahteraan masyarakat

yang tinggi di suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik khususnya pada negara-negara berkembang. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia sebagai paradigma baru model pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan untuk manusia (*enlarging people's choice*), yang dapat dilihat sebagai upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang akan dicapai. Pembangunan manusia juga dapat dilihat sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan.

### 2.1.2 Pengukuran dan Komponen Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan konsep yang dikembangkan oleh Amartya Sen yang merupakan peraih nobel ekonomi asal India dan seorang ekonom dari Pakistan yang bernama Mahbub Ul Haq. IPM merupakan indikator yang dijadikan alat ukur melalui standar pencapaian suatu negara. Terdapat tiga standar dasar yang menjadi ukuran dari IPM terhadap suatu pembangunan manusia. Pertama, panjang kehidupan (*length of life*) merupakan representasi angka harapan hidup. Kedua, pendidikan (*education*) merupakan kombinasi antara angka harapan lama sekolah

dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup layak yang di representasikan oleh *Gross National Income* (GNI) *per capita*.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengklasifikasikan negara maju, negara berkembang, atau negara terkebelakang serta mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Skor IPM terletak pada kisaran antara 0 hingga 1. Apabila skor IPM mendekati angka 1 maka akan semakin tinggi pula nilai IPM dan kualitas sumber daya manusia di negara atau wilayah tersebut. Kriteria IPM menurut *United Nations Development Program* (UNDP) disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 2. 1**

**Kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

| No. | Kriteria | Nilai IPM |
|---|---|---|
| 1. | Sangat Tinggi | ≥ 0,800 |
| 2. | Tinggi | 0,700 – 0,799 |
| 3. | Sedang | 0,550 – 0,699 |
| 4. | Rendah | < 0,550 |

Sumber: *United Nations Development Program* (UNDP)

Indikator komposit pembangunan manusia merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui nilai pembangunan manusia antar negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari perhitungan indeks pembangunan manusia menurut (Siswati & Hermawati, 2018) sebagai indikator pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

a) Membentuk indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
b) Menggunakan beberapa indikator agar dapat menjaga ukuran tersebut.
c) Membangun satu indeks campuran daripada sejumlah indeks dasar.

d) Menciptakan suatu ukuran yang melibatkan aspek sosial dan ekonomi.

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Lamba dkk. (2020) adalah sebagai berikut :

$$\text{IPM} = \frac{1}{3}(\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

Indeks $X_1$ = Harapan hidup

Indeks $X_2$ = Tingkat pendidikan

Indeks $X_3$ = Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Langkah yang dilakukan sebelum melakukan perhitungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut (Azzaki, 2021) adalah menghitung setiap komponen dari masing- masing indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$X_1 = X_1 - X_{min} / X_{max} - X_{min}$$

Dimana:

$X_{(1)}$ = Komponen IPM untuk i

$X_{(min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM

$X_{(max)}$ = Nilai maksimum daari komponen IPM

### 2.1.3 Konsep Konvergensi Pembangunan Manusia

Konvergensi dapat diartikan sebagai titik pertemuan dua objek pada satu titik. Dalam ilmu ekonomi, konvergensi dapat diartikan sebagai situasi di mana kesenjangan atau perbedaan pendapatan antarnegara terus berkurang seiring berjalannya waktu (Darku, 2021). Dengan kata lain, konvergensi terjadi ketika negara-negara berpendapatan rendah mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, sehingga

memungkinkan mereka untuk mengejar tingkat pendapatan negara-negara yang lebih kaya. Hal ini secara umum dikenal sebagai *the catch-up effect*.

Teori konvergensi dalam ilmu ekonomi berawal dari teori neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956). Sejak saat itu, konvergensi menjadi topik yang menarik di kalangan ekonom. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum pengembalian modal yang semakin berkurang menyebabkan konvergensi. Hal ini mengarah pada kondisi mapan di mana pengembangan teknologi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut teori tersebut, negara-negara yang belum mencapai kondisi mapan, biasanya negara-negara berkembang, cenderung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, negara-negara tersebut dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju yang telah mencapai kondisi mapan.

Selain teori Solow (1956), teori lain yang penting dalam kajian konvergensi adalah teori pemerataan harga faktor produksi yang dikemukakan oleh (Samuelson, 1948) dan teori Heckscher-Ohlin oleh Heckscher dan Ohlin. Menurut teori-teori tersebut, harga faktor produksi akan menjadi sama karena adanya ekspor barang dengan biaya peluang yang lebih rendah, sehingga terjadi kelebihan faktor produksi di suatu negara. Pemerataan biaya faktor produksi ini kemudian berkontribusi terhadap konvergensi harga faktor produksi. Akan tetapi, teori-teori tersebut kurang dapat diterapkan di dunia nyata karena faktor teknologi menyebabkan terjadinya variasi jenis barang yang diproduksi, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya faktor produksi.

Mengenai konvergensi, pengukuran konvergensi biasanya dilakukan dengan menghitung β-konvergensi dan σ-konvergensi (Choi, 2009). β-konvergensi mengacu pada proses di mana suatu wilayah atau negara dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara yang lebih kaya, yang menyebabkan negara-negara miskin mengejar tingkat pendapatan negara yang lebih kaya (Barro & Sala-I-Martin, 1991). β-konvergensi selanjutnya dibagi menjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut terjadi ketika pendapatan per kapita konvergen satu sama lain terlepas dari kondisi awal. Di sisi lain, konvergensi kondisional dapat dicapai ketika semua perbedaan antara kondisi mapan negara dihilangkan (Konya & Guisan, 2008). Di sisi lain, σ-konvergensi terjadi ketika kesenjangan pendapatan antara negara-negara menurun dari waktu ke waktu. Konvergensi σ dianggap lebih berguna daripada konvergensi β karena dapat mengidentifikasi distribusi pendapatan menjadi lebih merata atau tidak merata (Quah, 1993).

Selain konvergensi β dan konvergensi σ, ada metode lain untuk mengukur konvergensi. Salah satu metode tersebut adalah dengan menggunakan perbedaan antarnegara (Barrientos, 2007). Dalam metode ini, negara referensi digunakan sebagai tolok ukur. Biasanya, negara referensi adalah negara dengan pendapatan tertinggi, yang memungkinkan untuk memeriksa apakah perbedaan pendapatan antara negara-negara di suatu kawasan dibandingkan dengan negara referensi meningkat atau menurun. Jika perbedaan menurun dan mendekati nol, dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut konvergen ke arah negara referensi, dan sebaliknya dapat disimpulkan jika kesenjangan pendapatan antarnegara meningkat.

Selain itu, ada juga metode perbedaan dengan konsep yang mirip dengan yang ditemukan dalam penelitian Choi (2009). Namun, alih-alih menggunakan perbedaan, suatu negara akan mengalami lebih banyak konvergensi jika nilai konvergensinya mendekati 1.

Dengan menerapkan definisi konvergensi di atas pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), konvergensi dalam konteks pembangunan manusia dapat diartikan sebagai pengurangan kesenjangan pembangunan manusia atau penurunan perbedaan IPM antarnegara. Dengan kata lain, tingkat pembangunan manusia antarnegara akan mencapai tingkat yang sama. Oleh karena itu, sangat mungkin pembangunan manusia antarnegara akan konvergen.

Dalam praktiknya, baik konvergensi β maupun konvergensi σ digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis konvergensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Misalnya, penelitian oleh Konya dan Guisan (2008) menggunakan metode serupa untuk mengeksplorasi keberadaan konvergensi IPM. Namun, metode lain juga dapat digunakan dalam penelitian konvergensi IPM, seperti yang digunakan oleh Choi (2009) untuk meneliti dampak perdagangan bilateral terhadap konvergensi.

Penelitian tentang konvergensi pembangunan manusia di ASEAN yang menggunakan konvergensi pembangunan manusia sebagai variabel terikatnya masih jarang dilakukan dan sejauh ini baru ditemukan beberapa studi terkait. Salah satunya adalah penelitian oleh Pratama & Hastiadi (2024), yang meneliti pengaruh perdagangan intra-regional, perdagangan ekstra-regional, GDP *per Capita,* rasio FDI terhadap PDB, keterbukaan perdagangan, inflasi,dan pengeluaran pemerintah

terhadap konvergensi pembangunan manusia di ASEAN. Dengan menggunakan metode *fixed-effect* dalam penelitian tersebut, penelitian tersebut menemukan bahwa perdagangan intra-regional berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan perdagangan ekstra-regional berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perdagangan intra-regional berpengaruh negatif dan signifikan, perdagangan ekstra-regional berpengaruh positif namun tidak signifikan, GDP per *capita* berpengaruh positif dan signifikan, rasio FDI terhadap PDB tidak berpengaruh signifikan, keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kaukab dan Surwandono (2021) juga turut berkontribusi dalam penelitian tentang konvergensi pembangunan manusia di ASEAN. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti pengaruh *foreign direct investment* terhadap konvergensi indeks pembangunan manusia di ASEAN. Dengan menggunakan teknik *Generalized Method of Moments* (GMM), penelitian tersebut menemukan bahwa *foreign direct investment* memiliki dampak yang signifikan terhadap konvergensi pembangunan manusia di ASEAN.

### 2.1.4 Keterbukaan Perdagangan

Menurut Squalli dan Wilson (2006) dalam (Titik & Nuraeni, 2023), keterbukaan perdagangan berasal dari kata *trade* yang berarti perdagangan dan *oppeness* yang berarti keterbukaan. *Trade* adalah kegiatan melakukan aktivitas jual beli antara satu pihak dengan beberapa pihak lainnya dan *openness* adalah melakukan segala sesuatu dengan keterbukaan tanpa ada yang membatasi.

Bank Dunia mendefinisikan keterbukaan perdagangan sebagai jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari produk domestik bruto. Keterbukaan perdagangan merupakan rasio transaksi perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya terhadap produk domestik bruto, sehingga sering dijadikan sebagai indikator hubungan transaksi internasional terhadap domestik

Keterbukaan perdagangan mengacu pada perdagangan atau pertukaran barang, jasa, atau aset secara internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan terbuka adalah suatu sistem ekonomi dimana aktivitas ekonomi yang dijalankan berlangsung di dalam negara yang bersangkutan dan juga memiliki hubungan ekonomi dengan negara luar (Syamsuddin & Karya, 2016:149).

Melakukan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Menurut Sukirno (2019:360), ada empat keuntungan melakukan perdagangan diantaranya yaitu:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
3. Memperluas pasar industri-industri dalam negeri
4. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas.

### 2.1.5 Pengendalian Korupsi

Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Pengendalian korupsi mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam skala kecil maupun besar, serta pengambilalihan negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Variabel ini juga mengukur kekuatan dan efektivitas kebijakan dan kerangka kelembagaan suatu negara untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Menurut *Millenium Challenge Corporation (2024)*, untuk mendapatkan skor pengendalian korupsi, negara-negara dievaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

- Maraknya korupsi besar-besaran dan korupsi kecil-kecilan di semua tingkat pemerintahan;
- Dampak korupsi terhadap "daya tarik" suatu negara sebagai tempat berbisnis;
- Frekuensi "pembayaran tidak teratur" yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrak publik, utilitas publik, penilaian pajak, dan keputusan pengadilan;
- Nepotisme, kronisme, dan patronase dalam layanan sipil;
- Perkiraan biaya penyuapan sebagai bagian dari penjualan tahunan perusahaan;
- Keterlibatan pejabat terpilih, pejabat perbatasan, pejabat pajak, hakim, dan hakim agung dalam korupsi;

- Kekuatan dan efektivitas undang-undang, kebijakan, dan lembaga antikorupsi pemerintah;
- Kepercayaan publik terhadap kejujuran finansial politisi;
- Sejauh mana:
  - proses akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi di tingkat lokal ditetapkan;
  - otoritas pemerintah memantau maraknya korupsi dan menerapkan sanksi secara transparan;
  - peraturan tentang benturan kepentingan dan etika bagi pegawai negeri dipatuhi dan ditegakkan;
  - laporan pendapatan dan aset pejabat publik harus diverifikasi dan terbuka untuk diteliti oleh publik dan media;
  - pejabat senior pemerintah kebal terhadap tuntutan hukum atas kejahatan jabatan;
  - pemerintah menyediakan mekanisme yang memadai bagi korban korupsi untuk memperjuangkan hak-hak mereka;
  - administrator pajak menerapkan sistem audit internal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan pajak;
  - proses penyusunan anggaran eksekutif bersifat komprehensif dan transparan serta tunduk pada tinjauan dan pengawasan legislatif yang bermakna;
  - pemerintah memastikan transparansi, penawaran terbuka, dan persaingan yang efektif dalam pemberian kontrak pemerintah;

- terdapat perlindungan hukum dan fungsional bagi whistleblower, aktivis antikorupsi, dan investigator;
- tuduhan korupsi di tingkat nasional dan lokal diselidiki dan dituntut secara menyeluruh tanpa prasangka;
- pemerintah bebas dari peraturan birokrasi yang berlebihan, persyaratan pendaftaran, dan/atau kontrol lain yang meningkatkan peluang terjadinya korupsi;
- warga negara memiliki hak hukum untuk mendapatkan informasi tentang operasi pemerintah dan dapat memperoleh dokumen pemerintah dengan biaya yang terjangkau.

Satuan estimasi yang digunakan untuk mengukur pengendalian korupsi di suatu kawasan adalah estimasi agregat dalam satuan distribusi normal baku yang dimulai dari -2,5 sampai dengan 2,5. Semakin mendekati -2,5 maka semakin buruk, sebaliknya semakin mendekati 2,5 berarti tingkat pengendalian korupsi negara tersebut semakin baik.

### 2.1.6 Inflasi

Definisi singkat inflasi adalah kecenderungan harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan hanya pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas (mengakibatkan kenaikan) ke sebagian besar harga barang lainnya. Tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya (Sukirno, 2019:27).

Ada tiga indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi pada suatu periode tertentu (Rahardja & Manurung, 2019:366). Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)
3. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Tingkat inflasi suatu negara dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai indikator. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan indeks harga konsumen. Hal tersebut disebabkan karena indeks harga konsumen langsung mencerminkan perubahan harga yang memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan indeks harga konsumen diharapkan dapat lebih akurat dalam mengukur inflasi memengaruhi komponen indeks pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah perbandingan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar dan dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah formula Laspeyres dan dapat dihitung dengan metode angka kumulatif, rata-rata per tahun atau dari desember ke desember. Untuk dapat menghitung IHK diperlukan data dan informasi yang luas, yang diperoleh dari survei biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat.

Secara umum dan menyeluruh, inflasi dapat disebabkan oleh permintaan masyarakat yang berlebihan (*demand-pull inflation*) dan kenaikan biaya produksi (*cost-push inflation*) (Boediono, 1992) dalam (Runtunuwu, 2020). Inflasi dapat

disebabkan oleh tingginya permintaan uang yang mengakibatkan tingginya permintaan barang serta dapat mengakibatkan kenaikan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar karena meningkatnya permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan meningkatnya permintaan faktor-faktor produksi. Selain itu, peningkatan permintaan faktor produksi dapat memicu kenaikan harga barang. Sementara itu, inflasi juga dapat terjadi dari sisi penawaran akibat rendahnya produksi serta terkendala jalur distribusi.

Menurut Nopirin (2009) dan Sukirno (2011) dalam (Fauziana & Nusantara, 2018) inflasi dapat dibedakan berdasarkan penyebab, tingkat keparahan,dan asal timbulnya inflasi. Laju inflasi dari suatu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda dapat memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu:

a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
d. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi merupakan indikator krusial dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi, dengan syarat dan batasan yang masih toleran. Dengan begitu, inflasi akan mendorong perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Begitu pula sebaliknya, tingkat inflasi yang terlalu rendah akan menyebabkan sektor produksi tidak memiliki insentif untuk memacu produksi.

Salah satu dampak positif inflasi adalah pengusaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada biaya produksi yang dikeluarkannya. Jika harga naik (*demand pull inflation*), produsen akan terdorong untuk menambah jumlah barang atau jasa. Kenaikan ini niscaya akan meningkatkan pendapatan produsen, terutama jika menjual barang atau jasa yang tergolong kebutuhan pokok.

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penelitian dari Pratama dan Hastiadi (2024) dengan judul "*International Trade and Human Development Convergence: The Tale of ASEAN*" | - Variabel Konvergensi Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Keterbukaan Perdagangan | - Variabel *GDP Per Capita,* Rasio *FDI* terhadap PDB *,* Pengeluaran Pemerintah, Perdagangan Intra-Regional, dan Perdagangan Extra-Regional | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan intra-regional berpengaruh negatif dan signifikan, perdagangan ekstra-regional berpengaruh positif namun tidak signifikan, GDP *per Capita* berpengaruh positif dan signifikan, rasio FDI terhadap PDB tidak berpengaruh signifikan, keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. | *Economic Resurgence in ASEAN. Palgrave Macmillan, Cham.Springer*<br><br>*https://doi.org/10.1007/978-3-031-53410-2* |
| 2 | Penelitian dari Saputra dkk. (2024) dengan judul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, dan Pertumbuhan | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Pengeluaran Pemerintah di Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran | Berdasarkan hasil data penelitian yang telah diuji, disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel | *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* Vol.2, No.1 (2024) pp 104-113<br><br>e-issn: 3025-7824 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Ekonomi terhadap IPM Lombok Timur" | | | dependen, hal ini dinyatakan dengan nilai probabilitas (statistik F) yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari error yang diizinkan sebesar 0,05. Sedangkan secara parsial variabel pengeluaran pada bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif sedangkan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013-2022. | |
| 3 | Penelitian dari Harsono dkk. (2024) dengan judul "Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB Tahun 2013-2022" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Bantuan Sosial | Hasil dari penelitian ini adalah belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2022. | *Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol* 5(1) 2024: 802-810<br><br>p-ISSN: 2715-7911, e-ISSN: 2715-792X |
| 4 | Penelitian dari Dzihny dkk. (2023) dengan judul "*Macroeconomics , human development, and political stability: evidence from OIC coutries*" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Keterbukaan Perdagangan | - Variabel Stabilitas Politik, Pengangguran, dan Penanaman Modal Asing<br>-Teknik analisis GMM (*Generalized Method Moment*) dan MRA (*Moderated Regression Analysis*) | Pada bagian pertama, temuan menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM. Sementara itu, keterbukaan perdagangan memiliki efek positif yang signifikan terhadap IPM dan penanaman modal asing memiliki efek negatif yang signifikan terhadap IPM. Kemudian stabilitas politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Pada bagian kedua, nilai variabel moderator | Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 24 Nomor 2, 390-411, Oktober 2023. DOI: 10.18196/jesp.v24i2.19509<br><br>E-ISSN: 2541-5506, P-ISSN: 1411-9900 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | (stabilitas politik) pada hubungan antara pengangguran dan IPM menunjukkan bahwa stabilitas politik berperan sebagai "*Quasi Moderator*" yang berarti bahwa ketidakstabilan politik dapat memperparah pengaruh negatif pengangguran terhadap IPM di negara-negara OKI. | |
| 5 | Penelitian dari Angkat dan Saharuddin (2023) dengan judul "Pengaruh Indeks Gini Rasio, Indeks Kemahalan Konstruksi, Pengeluaran Per Papita terhadap Indeks Pembangunan Manusia" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Indeks Gini Rasio, Pengeluaran Per Kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi | Hasil dari penelitian ini adalah indeks gini rasio tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan kontruksi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara. | Jurnal Ekonomi Regional Unimal, *Volume* 6 *Number* 2 2023<br><br>E-ISSN: 2615-126X |
| 6 | Penelitian dari Talahaturusun dkk. (2023) dengan judul "Pengaruh Financial Technology terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Pinjaman P2P dan Kontrol Kredit Perbankan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan, variabel kontrol kredit perbankan tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. | Journal on Education Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, pp. 8644-8651<br><br>E-ISSN: 2654-5497 , P-ISSN: 2655-1365 |
| 7 | Penelitian dari Haryono dkk. (2023) dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya pada Pertumbuhan | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Indeks Kejahatan | Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel Pengangguran secara negatif dan signifikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kejahatan atau kriminalitas secara negative dan signifikan berpengaruh terhadap | *Journal of Applied Business and Economic* (JABE) Vol. 9 No. 3 (Maret 2023) 336-352<br><br>p-ISSN : 2356 4849, e-ISSN : 2528 6153 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Ekonomi di Pulau Jawa" | | | indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. | |
| 8 | Penelitian dari Nurlina dkk. (2023) dengan judul" Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2021" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Inflasi | - Metode analisis menggunakan model autoregressive distributed lag(ARDL). -Variabel Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan | Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. | Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 14, Nomor 2, Mei 2023<br><br>P-ISSN: 2089-1989E, ISSN: 2614-1523 Terakreditasi (SK No.225/E/KPT/2022) |
| 9 | Penelitian dari Tumbuan dkk. (2023) dengan judul "Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Belanja Modal, Angka Partisipasi Sekolah, dan Pengangguran | Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja modal, pendidikan dan pengganggguran secara bersama-sama berpengaruh positif untuk terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Manado. Belanja modal dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel pengangguran secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifkan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Manado. | Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No.2 Bulan Februari 2023<br><br>ISSN: 0853-6708 |
| 10 | Penelitian dari Muhamad dan Rahmi (2023) dengan judul "Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi | Dapat disimpulkan bahwa, variabel teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021 dengan nilai koefisien sebesar -0,193230 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0111, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021 dengan nilai koefisien sebesar -1,541790 dan nilai | Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB) Volume 3, No. 1, Juli 2023<br><br>e-ISSN: 2798-639X, p-ISSN: 2808-3024 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | probabilitasnya 0,0571, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai koefisiennya sebesar 1.73E-10 dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,0131, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021. | |
| 11 | Penelitian dari Wibowo (2023) dengan judul "*Political Stability and Human Development in The Muslim Countries"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | - Variabel Stabilitas Politik<br>-Teknik analisis menggunakan *Granger causality test* | Hasil penelitian menunjukkan kausalitas dua arah antara stabilitas politik dan indeks pembangunan manusia di semua negara anggota OKI. Namun, di negara-negara dengan IPM yang sangat tinggi, hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat searah. Sebaliknya, kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan di negara-negara dengan IPM tinggi dan rendah. | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4110-4117<br><br>ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN: 2579-6534 |
| 12 | Penelitian ini dari Putri dan Auwalin (2021) dengan judul "Pengaruh Produksi Minyak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara Anggota OKI" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi | Variabel Volume Produksi Minyak, Harga Minyak Dunia, PDB, dan Jumlah Penduduk | Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa volume produksi minyak dan harga minyak dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. PDB menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan, inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 3 Mei 2021: 288-296<br>p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. |
| 13 | Penelitian dari Kaukab dan Surwandono (2021) dengan judul "*Convergence of Human Development Index: Case Study of Foreign Direct Investment in ASEAN*" | Variabel Konvergensi Indeks Pembangunan Manusia | - Metode Penelitian GMM (Generalized Method of Moments)<br>- Variabel Produk Domestik Bruto per Kapita dan *Foreign Direct Investment* | Berdasarkan sampel tahunan negara-negara dengan IPM tinggi (Malaysia, Thailand, Singapura) ditambah dengan negara-negara IPM sedang (Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Indonesia, dan Filipina) selama periode 2013-2017, penulis menemukan dampak | *Business: Theory and Practice, Volume 22 Issue 1: 12–17*<br><br>ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202 https://doi.org/10.3846/btp.2021.12153 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | signifikan secara statistik terhadap *home country GDP, source country FDI towards all countries, and FDI percentage of the home country* dibandingkan seluruh negara. | |
| 14 | Penelitian ini dari Saputra dkk. (2021) dengan judul "Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pembangunan Manusia di Wilayah Timur Indonesia" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Rasio Jalan Per Luas Wilayah dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jalan berpengaruh positif dan variabel TIK berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. | Jurnal Menara Ekonomi Volume 7 No. 1 – April 2021<br><br>ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 |
| 15 | Penelitian dari Linawati dkk. (2021) dengan judul "Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia :Studi Kasus Negara Berkembang OKI" | - Variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia<br>- Variabel Independen Pengendalian Korupsi | - Variabel Dependen *GDP Per Capita*<br>- Variabel Independen Stabilitas Politik, Suara dan Akuntabilitas, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, dan Kualitas Regulasi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan supremasi hukum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada model indeks pembangunan manusia hanya variabel aturan hukum yang memiliki pengaruh signifikan. | Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, e-ISSN: 2615-5028, Vol 4, No 2, 2021, pp 133-144<br><br>https://dx.doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547 |
| 16 | Penelitian dari Azzaki (2021) dengan judul "Pengaruh Perdagangan Internasional, dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara- Negara ASEAN" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Keterbukaan Ekonomi | Variabel Ekspor dan Impor | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan (simultan) variabel ekspor, impor, dan keterbukaan ekonomi mempengaruhi indeks pembangunan manusia di ASEAN. Secara satuan (parsial) variabel independen ekspor, impor, dan keterbukaan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) 2021, Vol. 10, No.2, 154-174<br><br>P-ISSN : 2087-9954, E-ISSN : 2550-0066 |
| 17 | Penelitian dari Dewi dkk. (2021) dengan judul "Analisis Pengaruh | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan | Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak terdapat pengaruh signifikan atau pengaruhnya tidak besar | Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853e-ISSN: 2684-883XVol.3, No.4, April 2021 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro" | | | terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan untuk kemiskinan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2002 hingga 2019. | |
| 18 | Penelitian dari Herman (2021) dengan judul "*Impact of Inflation and City Minimum Wages on Human Development Index in Indonesia"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi | Variabel Upah Minimum Kota | Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dalam hal ini yaitu secara parsial, inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru, sedangkan upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Pekanbaru. sedangkan secara simultan bahwa inflasi dan upah minimum kota berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kota Pekanbaru. dan besarnya pengaruh inflasi dan upah minimum kota terhadap indeks pembangunan manusia di kota Pekanbaru sebesar 98,8%, sisanya sebesar 1,20% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. | Husnayain Business Review, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.54099/hbr.v1i1.5<br><br>ISSN: 2477-1368 |
| 19 | Penelitian dari Rantuwuwu (2020) dengan judul "*Analysis of Macroeconomic Indicators and It's Effect on Human Development Index (HDI)*" | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi | Variabel Pendapatan Per Kapita dan Pengangguran | Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebaliknya, pendapatan per kapita dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Inflasi, pendapatan per kapita, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia | Society, 8(2), 596-610, DOI: 10.33019/society.v8i2.246<br><br>P-ISSN: 2338-6932, E-ISSN: 2597-4874 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | (IPM) di Kota Ternate. Nilai determinasi variabel bebas (R Square) terhadap variabel terikat sebesar 0,836 atau 83,6%. Artinya inflasi, pendapatan per kapita, dan pengangguran mampu mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ternate sebesar 83,6%, sisanya 16,4% dipengaruhi oleh faktor lain. | |
| 20 | Penelitian dari Ogbebo dkk. (2020) dengan judul "*Inflation and Standard of Living in Nigeria"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi | - Teknik analisis menggunakan *Auto Regressive Distributed Lagged* (ARDL) dan *Error Correction Model* (ECM)<br>- Fokus penelitian berbeda, dimana pada penelitian ini variabel indeks pembangunan manusia digunakan sebagai proksi dari standar hidup layak. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara inflasi dan standar hidup. Inflasi menunjukkan efek negatif dan signifikan dengan koefisien -0,034 terhadap nilai *P-value* sebesar 0,017 yang menyiratkan bahwa kenaikan inflasi sebesar satu unit akan mengakibatkan penurunan standar hidup sebesar 0,034 unit selama periode penelitian. | International Journal of Developing Country Studies Vol 2, Issue No.1, Pp 1- 19, 2020<br><br>ISSN 2958-7417 (online) |
| 21 | Penelitian dari Febriyanti dan Indriyati (2020) dengan judul "*The Effect of Inflation, Poverty, and Investment on Sustainable Development in West Kalimantan Province"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi | Variabel Kemiskinan dan investasi | Hasil uji parsial menunjukkan bahwa inflasi dan investasi tidak berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan kemiskinan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa inflasi, kemiskinan dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. | Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Vol. 14 No. 1<br><br>ISSN: 2614-1345, P-ISSN: 1907-8439 |
| 22 | Penelitian dari Priambodo (2020) dengan judul "*The* | Variabel Dependen Indeks | - Variabel Dependen | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan | Perwira International Journal of |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | *Impact of Unemployment and Poverty on Economic Growth and The Human Development Index (HDI)"* | Pembangunan Manusia | Pertumbuhan Ekonomi<br>- Variabel Independen Kemiskinan dan Pengangguran | kemiskinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga. Pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan IPM secara negatif. | Economics & Business, 1(1), 29–36. https://doi.org/10.54199/pijeb.v1i1.43 |
| 23 | Penelitian dari Regina dkk. (2020) dengan judul "*Analysis The Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi | Hasil penelitian menemukan bahwa (1) kemiskinan berpengaruh signifikan negatif (0,000) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, (2) dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif (0,000) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia dan (3) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan (0,676) dan berhubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. | Jurnal Economic Resources, Volume 3, No. 2, September 2020<br><br>ISSN: 2620-6196 |
| 24 | Penelitian dari Safwadi (2020) dengan judul "*The Impact of the Special Autonomy Fund on the Convergence of the Human Development Index in Aceh"* | Variabel Indeks Pembangunan Manusia | Variabel Dana Otonomi Khusus, Tingkat Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Penduduk Bekerja | Pada analisis konvergensi kondisional menggunakan panel *Dynamic Fixed Effect*, ditemukan bahwa proses konvergensi antar kabupaten/kota terjadi. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lag IPM yang kurang dari satu, yaitu sebesar 0,7822 yang signifikan pada taraf nyata satu persen. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan. Jumlah penduduk yang bekerja memiliki koefisien negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Variabel kepadatan penduduk | Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 8, No. 1, Januari 2020, Pages: 179-200, doi:10.26811/peuradeun.v8i1.367<br><br>P-ISSN: 2338, E-ISSN: 2443-2067 |

| No | Nama Penulis dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | memiliki pengaruh positif dan signifikan. | |
| 25 | Penelitian dari Ortega dkk. (2016) dengan judul *"Corruption and Convergence in Human Development: Evidence from 69 Countries During 1990–2012"* | - Konvergensi Indeks Pembangunan Manusia | - Indeks Persepsi Korupsi | Hasilnya menunjukkan bahwa proses konvergensi di seluruh kelompok negara tidak homogen dan bahwa pembangunan manusia mengikuti pola pertumbuhan yang berbeda. Hasilnya juga menunjukkan bahwa jika korupsi merusak pertumbuhan pembangunan manusia di berbagai negara, hal itu terutama disebabkan oleh dampak negatifnya terhadap pertumbuhan pendapatan dan pencapaian kesehatan. | *Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Springer, vol. 127(2), pages 691-719,* *https://doi.org/10.1007/s11205-015-0968-8* |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Keterbukaan Perdagangan dengan Konvergensi Pembangunan Manusia

Secara umum, keterbukaan perdagangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui dorongan efisiensi produksi, transfer teknologi, dan akses ke pasar global yang lebih luas. Kombinasi faktor-faktor tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita. Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Huchet-Bourdon dkk., 2018; Intisar dkk., 2020; Keho, 2017; Muharromy & Auwalin, 2021; Okwu dkk., 2020).

Keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung umumnya dianggap sebagai faktor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan manusia (Chih dkk., 2022; Okwu dkk., 2020; Tahir & Khan, 2014). Pertumbuhan ekonomi memungkinkan negara untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Selain itu, keterbukaan perdagangan mempercepat difusi teknologi dan inovasi, sehingga kualitas layanan kesehatan dan pendidikan meningkat. Oleh karena itu, keterbukaan perdagangan memiliki potensi besar untuk mendorong konvergensi indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN. Membuka perekonomian memungkinkan negara-negara berindeks pembangunan manusia rendah untuk mengakses teknologi, pasar, dan berbagai kebutuhan esensial, sehingga mempercepat pembangunan manusia.

### 2.2.2 Hubungan Pengendalian Korupsi dengan Konvergensi Pembangunan Manusia

Korupsi menjadi masalah penting di seluruh dunia dan dapat menjadi salah satu penyebab utama dari terhambatnya suatu proses pembangunan. Akcay (2006) menyatakan bahwa korupsi termasuk ke dalam masalah besar dan berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi dan secara umum juga terhadap indeks pembangunan manusia di negara berkembang. Korupsi dibenci dan dimusuhi rakyat dimanapun karena dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, ketimpangan sosial serta menurunkan kesejahteraan (Farooq dkk., 2013; Gupta dkk., 2002; Mauro, 1995; Treisman, 2000).

Pengendalian korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Saleem (2014) yang menemukan bahwa pengendalian korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anantika & Sasana (2021). Penelitian tersebut menemukan bahwa korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC. Penelitian tersebut menemukan bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan manusia pada negara anggota APEC, maka akan semakin rendah pula permasalahan korupsi yang ada di negara tersebut karena anggaran pemerintah dapat dipastikan mampu dialokasikan dengan efektif dan efisien, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya.

Hasil serupa dapat ditemukan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam peningkatan pembangunan manusia, suatu negara tidak dapat terpisahkan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di negara tersebut (Akcay, 2006; Del Monte & Papagni, 2001; Hanafi, 2018; Hysa, 2011; Sims dkk., 2012). Negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengalokasian anggaran yang tepat. Namun, ketika korupsi terjadi pada dana anggaran pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk pengoptimalan program kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, maka permasalahan tersebut akan berpengaruh pada fungsi dana anggaran dan

kualitas kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pengendalian korupsi memiliki peran penting dalam mempercepat konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022. Penelitian Ortega dkk. (2016) yang berjudul "*Corruption and Convergence in Human Development: Evidence from 69 Countries During 1990–2012*" menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak pertumbuhan pembangunan di berbagai negara, terutama karena dampak negatifnya terhadap pertumbuhan pendapatan dan pencapaian kesehatan.

Pengendalian korupsi merupakan faktor penting dalam mempercepat konvergensi pembangunan manusia. Melalui mengurangi korupsi, suatu negara dapat mengalokasikan sumber daya publik dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas pemerintahan, menciptakan iklim ekonomi yang stabil, serta memperluas akses dan mutu layanan publik.

### 2.2.3 Hubungan Inflasi dengan Konvergensi Pembangunan Manusia

Inflasi adalah salah satu variabel makroekonomi yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, termasuk terhadap indeks pembangunan manusia. Inflasi yang tidak dapat diprediksi akan menyulitkan pengambilan keputusan bagi para pelaku ekonomi, karena harus memutuskan apakah akan mengonsumsi, berinvestasi, atau berproduksi, sehingga menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi (Islam, 2022; Okwu dkk., 2020; Yolanda, 2017).

Variabel inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap konvergensi pembangunan manusia karena inflasi secara tidak langsung dapat menurunkan daya beli masyarakat (Pratama & Hastiadi, 2024). Inflasi yang tinggi cenderung memengaruhi kelompok berpenghasilan rendah dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Kondisi ini berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

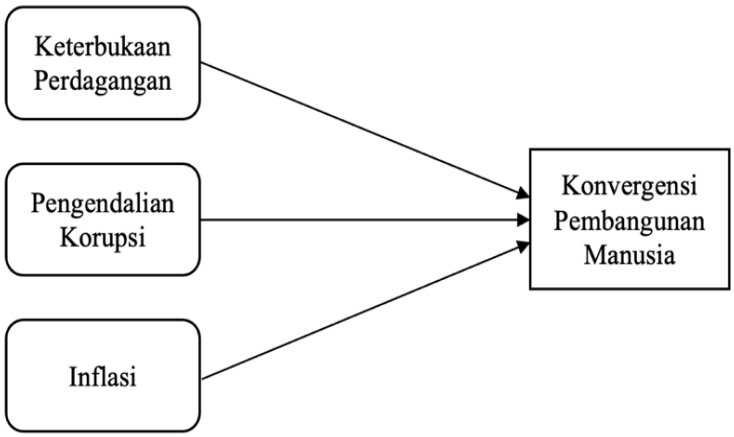


**Gambar 2. 1**
**Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh secara parsial

a. Keterbukaan perdagangan terhadap konvergensi pembangunan manusia

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan keterbukaan perdagangan secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

$H_a$ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan keterbukaan perdagangan secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

b. Pengendalian korupsi terhadap konvergensi pembangunan manusia

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian korupsi secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

$H_a$ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian korupsi secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

c. Inflasi terhadap konvergensi pembangunan manusia

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan inflasi secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

$H_a$ : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan inflasi secara parsial terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

2. Pengaruh secara simultan

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan keterbukaan perdagangan, pengendalian korupsi, dan inflasi secara simultan terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.

$H_a$ : Terdapat pengaruh signifikan keterbukaan perdagangan, pengendalian korupsi, dan inflasi secara simultan terhadap konvergensi pembangunan manusia di negara-negara ASEAN pada tahun 2007-2022.